

ABSTRAK

Puti Arrisya Langendria. 89021/2007. Penertiban Penambang Emas di Sepanjang Aliran Sungai Buluh oleh Pemerintah Kabupaten Bungo

Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya penambangan emas ilegal yang dilakukan di sepanjang aliran sungai di Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penertiban penambang emas ilegal di sepanjang aliran sungai di kabupaten bungo, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui upaya awal yang ditempuh dalam mengatasi kendala dalam penertiban penambangan ilegal ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena peneliti memberikan gambaran tentang keadaan sebagaimana mestinya. Informan penelitian ditentukan dengan cara *teknik purposive sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Tetapi penertiban ini tidak menghasilkan pencapaian tujuan yang diharapkan yaitu dapat menertibkan penambangan dengan tidak adanya lagi kegiatan penambangan ilegal oleh masyarakat. Karena dalam penertiban ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo mengalami kendala yang harus dihadapi. Selain belum adanya Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penambangan emas di Kabupaten Bungo, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penambangan emas ilegal ini sangat dibutuhkan. Tingginya keinginan masyarakat untuk melakukan penambangan emas berhubungan dengan tuntutan ekonomi masyarakat. Dan yang menjadi kendala yang harus dihadapi aparatur Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Bungo ini adalah adanya kerjasama oknum pemerintah untuk melindungi kegiatan penambangan emas ilegal ini. Indikasi keterlibatan oknum pemerintah dalam melindungi kegiatan ini telah berdampak pemberontakan perilaku masyarakat. Hal ini merupakan kendala utama yang menjadi pengahambat aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan penertiban penambang emas ilegal tersebut.